



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

BPBD



Jln. Buano No. 5 - Kota Masohi



<https://bpbd.maltengkab.go.id>



bpbdkabmalteng@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026. Selain itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan laporan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Masohi, Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maluku Tengah



Drs. NICOLAS N. ANAKOTTA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661106 198803 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi serta Susunan Organisasi	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi	8
1.5. Sistematika Penyajian LKjIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Matriks dan Tabel Kinerja)	10
2.2. Indikator Kinerja Utama	13
2.3. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai BPBD Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan akhir tahun 2025	4
2. Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	12
3. Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	13
4. Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	14
5. Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	15
6. Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	16
7. Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2023-2026	17
8. Tabel 3.4. Persentase Kontribusi Kementerian/Lembaga dan Jumlah Indikator	17
9. Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025	18
10. Tabel 3.6. Efisiensi Pencapaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025 ...	19
11. Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	20
12. Tabel 3.8. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Tahun 2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LKjIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah. LKjIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2025 serta Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati Maluku Tengah ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana.

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah terletak di komplek Perkantoran Kabupaten Maluku Tengah Jl. Buano No. 5 Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun anggaran 2025 ini didukung oleh SDM sejumlah 39 orang ASN dan 2 orang Non-ASN (*Data per 2025*).

Gambaran kompetensi aparatur BPBD Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenjang, tingkat struktural dan fungsional, pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan jabatan: Jabatan Eselon II sejumlah 1 orang, Jabatan Eselon III sejumlah 4 orang, Jabatan Eselon IV sejumlah 1 Orang, Jabatan Fungsional 5 Orang dan pelaksana sejumlah 30 orang.
2. Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan: S2 sejumlah 3 Orang, S1 sejumlah 29 Orang, D3 sejumlah 1 Orang, SMA sejumlah 8 Orang.
3. Jumlah ASN berdasarkan pendidikan dan pelatihan struktural PIM III sejumlah 2 Orang, PIM IV sejumlah 3 orang.
4. Jumlah ASN dan Non-ASN BPBD berdasarkan jenis kelamin: Laki-laki sejumlah 32 orang dan perempuan sejumlah 9 orang.

Tabel 1. 1
Jumlah dan Distribusi Pegawai BPBD Maluku Tengah
sampai dengan 2025

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	3
6	Penata Tingkat I	III/d	5
7	Penata	III/c	3
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	11
9	Penata Muda	III/a	6
10	Pengatur Tingkat I	II/d	3
11	Pengatur	II/c	1
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Ahli Pertama	IX	4
15	Pemula	V	1
16	Non-ASN	-	2
			41

Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non-ASN		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
S2	2	1	-	-	-	-	3
S1	18	5	3	1	2	-	29
D3	-	1	-	-	-	-	1
SMA/Sederajat	7	-	-	1	-	-	8
SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	27	7	3	2	2	0	41

1.2 Tugas Pokok, Fungsi Serta Susunan Organisasi

1.2.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah berfungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2.3 Struktur Organisasi

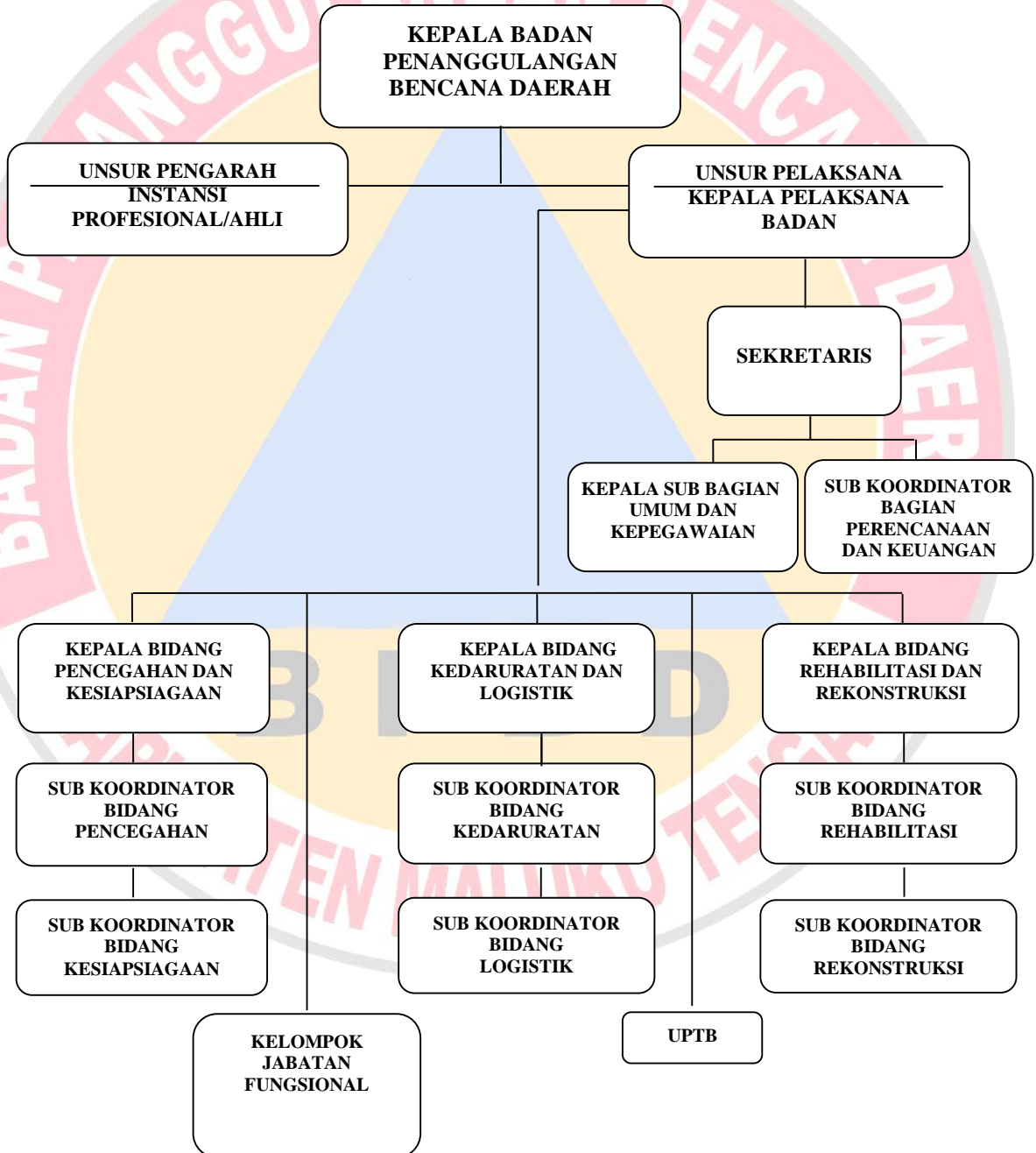
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

1. Unsur Kepala BPBD selaku *Ex Officio* Eselon II.a,
2. Unsur Kepala Pelaksana BPBD Eselon II.b
3. Unsur Pembantu Kepala Pelaksana : Sekretariat BPBD (Eselon III.a)
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a)
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan (Fungsional)
4. Unsur Pelaksana Bidang, terdiri atas :
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Eselon III.b)
 - Sub Koordinator Pencegahan (Fungsional)
 - Sub Koordinator Kesiapsiagaan (Fungsional)
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik (Eselon III.b)
 - Sub Koordinator Kedaruratan (Fungsional)
 - Sub Koordinator Logistik (Fungsional)

- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Esselon III.b)
 - Sub Koordinator Rehabilitasi (Fungsional)
 - Sub Koordinator Rekonstruksi (Fungsional)
- 5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah



1.3 Maksud dan Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah selalu membuka diri dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya. Penyampaian dokumen LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang bersih, berwibawa, legitimate dan bertanggungjawab, sehubungan dengan itu penyampaian LKjIP memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyampaian LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah :

Untuk memberikan gambaran kepada semua pemangku kepentingan (khususnya kepada Bupati Maluku Tengah dan Instansi penilai Akuntabilitas) tentang capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Sebagai alat untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan;

3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/ kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi Badan;
4. Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Badan;
6. Mendorong Badan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Menjadikan Badan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan aktifitas geologi di kawasan *triple junction* (pertemuan tiga lempeng bumi);
2. Peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem berdampak pada keselamatan masyarakat dan infrastruktur;
3. Rendahnya literasi masyarakat tentang kebencanaan;
4. Terbatasnya jumlah personil serta minimnya pelatihan dasar manajemen bencana untuk petugas, relawan, dan masyarakat;
5. Sistem peringatan dini (*early warning system*) belum menjangkau seluruh wilayah rawan;
6. Peralatan evakuasi, komunikasi, dan logistik yang belum memadai serta minimnya gudang logistik dan posko siaga di lokasi rawan bencana;
7. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana belum memadai serta menjadi acuan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Minimnya regulasi daerah sebagai payung hukum pelaksanaan penanggulangan bencana;
9. Lemahnya koordinasi dan sistem kendali penanganan bencana;
10. Minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana serta belum optimalnya pemanfaatan dana siap pakai, maupun sumber pendanaan lainnya.

1.5 Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja sasaran maupun kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, maka fokus pertanggungjawaban (*Accountability*) lebih diarahkan pada capaian kinerja Program/Kegiatan yang merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Guna memudahkan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2025 lebih dipahami oleh semua stakeholder, serta untuk memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan instansi penilai, maka sistematika penyajiannya tetap berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Maksud dan Tujuan, Permasalahan Utama yang dihadapi dan Sistematika Penyajian LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Muatan Rencana strategis (Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Matriks dan Tabel Kinerja) dan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja serta Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 berdasarkan analisis pencapaian kinerja yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Matriks dan Tabel Kinerja)

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah : **Mewujudkan Maluku Tengah yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan Dalam Semangat Hidup Orang Basudara.**

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi Kepala Daerah yang meliputi:

1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Secara Adil dan Merata;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;

4. Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Berwawasan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;

5. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Transparansi.

Dari ke-lima misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, misi yang bersentuhan langsung dengan Tugas pokok dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu misi keempat "Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Berwawasan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana". Untuk mewujudkan misi keempat tersebut, Kepala Daerah telah menyusun program di bidang kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bahan acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menyusun Rencana Strategi untuk empat tahun mendatang.

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan di semua sektor maka ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik tentu akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya sehingga dapat memberi sumbangan dan kontribusi terhadap peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Persoalan dan dimensi pembangunan daerah yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia cenderung terbatas. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan dimaksud, maka tentunya dibutuhkan kemampuan dan kerja keras dari seluruh komponen serta stakeholder dalam upaya penanggulangann bencana dimaksud dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan OPD (BPBD):

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
2. Meningkatkan Kualitas Pengurangan Risiko Bencana

Sasaran OPD (BPBD):

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Indikator : Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana
Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Penyusunan Strategi dan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah :

Strategi :

- Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah yang profesional, disiplin, dan berbasis merit sistem/ kompetensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- Penguatan sistem ketahanan, mitigasi dan rehabilitasi bencana

Kebijakan:

- Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Agenda :

Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah yang profesional, disiplin, dan berbasis merit sistem/ kompetensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Agenda :

Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Mitigasi dan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	Penguatan sistem ketahanan, mitigasi dan rehabilitasi bencana	Peningkatan pemenuhan sarana prasarana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan OPD untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Mitigasi dan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Tools Analisa Indeks Ketahanan Daerah https://sites.google.com/view/krb-bnpb/ikd	Hasil Evaluasi Penilaian IKD	1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan 3. Bidang Rehailitasi dan Rekonstruksi

Ketahanan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu pada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya.

Panduan ini sedapat mungkin mengacu kepada prinsip dan karakter pembangunan Ketahanan pada skala internasional dan nasional. Selain itu panduan ini juga harus memiliki kemampuan untuk dapat digunakan pada seluruh jenis ancaman bencana pada seluruh daerah di Indonesia. Oleh karenanya kesederhanaan dan komprehensivitas indikator menjadi dasar penyusunan Panduan penilaian Ketahanan daerah. Pengukuran indeks Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana adalah dengan pengisian tools analisa yang terdiri dari 7 prioritas, 71 indikator dan 284 pertanyaan (<https://sites.google.com/view/krb-bnpb/ikd>).

2.3 Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini berisi sasaran perangkat daerah pada dokumen rencana strategis tahun 2025-2029 yang targetnya disesuaikan dengan pagu indikatif perangkat daerah dan dituangkan kedalam rencana kerja tahun 2025 seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB (82,04)
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,53

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian kinerja akan memberi jawaban terhadap keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pengurangan risiko bencana guna mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Capaian indicator sasaran BPBD digambarkan sebagai berikut:

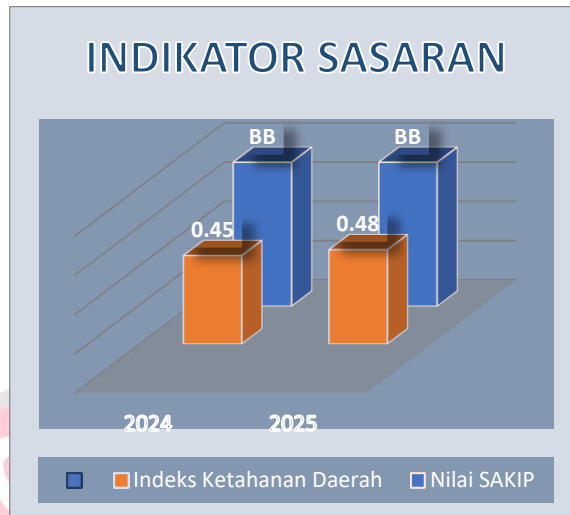
Tabel 3. 1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Sumber Data
			Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (82,04)	BB (73,30)	89,35%	Hasil Evaluasi SAKIP OPD
Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0.53	0.48	90,57%	Hasil Evaluasi Penilaian IKD

Capaian realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana tahun 2025 untuk sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan" dengan target 82,04 terealisasi 73,30 hanya mencapai 89,35%. Sedangkan untuk sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana" dengan target 0.53 terealisasi 0.48 dengan persentase capaian mencapai 90,57%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (2024) dapat dilihat pada gambar berikut:



Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana” tahun 2025 naik 6,67% Indeks dibanding tahun 2024, sedangkan untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” tahun 2025 sama dengan tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024	2025	Persentase
1	Nilai SAKIP	Nilai	BB (73.30)	BB (73.30)	-
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.45	0.48	6,67 %

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan” tahun 2025 sudah mencapai 83,26% dari target rencana strategis tahun 2025-2029. Sedangkan untuk sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana” tahun 2025 mencapai 78,69% dari target rencana strategis tahun 2025-2029, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan
Target Renstra Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target s/d 2026	Realisasi s/d 2025	%
1	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	A (89,12)	BB (73,30)	82,25%
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.71	0.48	67,60%

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang harus dilakukan

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana adalah dengan pengisian tools analisa yang terdiri dari 7 prioritas, 71 indikator dan 284 pertanyaan (<https://sites.google.com/view/krb-bnpb/ikd>) dan hasilnya bergantung pada kontribusi dari beberapa instansi pemerintah di daerah yang melaksanakan urusan Kementerian/Lembaga pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Presentase Kontribusi Kementerian/Lembaga dan Jumlah Indikator

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH INDIKATOR	PERSEN
1	BMKG	1	1.2%
2	BMKG, KEMEN PU-PERA, KEMEN ESDM, BIG, KEMANTAN	1	1.2%
3	BNPB	31	43.4%
4	BRG	1	1.7%
5	KEMEN ATR	2	2.1%
6	KEMEN ESDM	3	2.8%
7	KEMEN PU-PERA	12	23.1%
8	KEMEN PU-PERA, KKP	1	1.7%
9	KEMENDAGRI	9	9.5%
10	KEMENDIKDASBUD, KEMENAG	1	1.6%
11	KEMENKES	1	1.6%
12	KEMENKOMINFO	1	0.8%
13	KEMENPU-PERA	1	1.4%
14	KEMANTAN	1	0.3%
15	KEMANTAN, KEMEN PU-PERA	1	1.2%
16	KLHK	3	4.7%
17	POLRI	1	1.8%
TOTAL		71	100.0%

Hasil pengukuran indeks Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5
Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KETAHANAN DAERAH	TINGKAT KETAHANAN DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,55	0,48	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,23		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,62		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,63		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,51		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,46		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,40		

3.1.4.1 Kenaikan Kinerja

Indeks Ketahanan Daerah mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh antara lain:

- 1) Kegiatan yang menjawab indikator dari 7 prioritas Indeks Ketahanan Daerah dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan meskipun mengalami keterbatasan anggaran. Nilai dari output kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya baik berupa dokumen, pembangunan maupun pembinaan masyarakat sebagian besar dapat dimasukkan pada saat penilaian karena sudah kadaluarsa seperti dokumen Kajian Risiko Bencana dan dokumen Rencana Kontinjensi Bencana yang sudah selesai 4 tahun masa berlaku dan belum dapat diperbaharui, Peningkatan Ketahanan dan pelatihan yang harus dilakukan secara berkala minimal 2 tahun sekali, Simulasi (khusus tsunami dan erupsi gunung api) yang harus dilakukan minimal 1 tahun sekali, dan lain-lain.
- 2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, dokumen Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang hingga saat ini belum disusun karena membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar, selain

dokumen-dokumen tersebut, untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah terhadap penanggulangan bencana juga diperlukan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan, Peraturan tentang Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan, Peraturan tentang Operasionalisasi dan Implementasi Pengelolaan Air, Peraturan Mitigasi Struktural (Tanaman dan/atau bangunan) penahan gelombang tsunami.

- 3) Pembagian tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana antara BPBD dengan OPD teknis lain yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan perubahan regulasi tentang nomenklatur program/kegiatan berjalan cukup optimal.

3.1.4.2 Solusi yang harus dilakukan

Solusi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah, di antaranya:

- 1) Mengupayakan penyusunan dokumen-dokumen utama maupun regulasi kebencanaan yang wajib dimiliki oleh daerah.
- 2) Memprioritaskan sub kegiatan yang ada pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana dan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 3) Berkoordinasi secara intens dengan OPD teknis lain yang berkaitan dengan kebencanaan agar memprioritaskan kegiatan yang menunjang peningkatan Indeks Kaspitas Daerah terhadap Penanggulangan Bencana.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum, istilah efisiensi ini merujuk kepada cara yang dilakukan agar suatu pekerjaan mencapai hasil yang maksimal tanpa mengeluarkan sumber daya yang berlebihan atau menyia-nyiaikan sumber daya yang ada. Pada tahun 2025, efisiensi pencapaian target sasaran strategis BPBD dibandingkan dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6

Efisiensi Pencapaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	90.57%	97.34%	-7.48%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP	89.35%	97.44%	-9.06%

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Pencapaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah dilaksanakan melalui program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Penunjang Perangkat Daerah			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	100,00%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4 Unit	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	100,00%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana			

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Jumlah Laporan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	130 Orang	40 Orang	100,00%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7 Laporan	3 Laporan	100,00%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 Orang	30 Orang	100,00%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	20 Unit	20 Unit	100,00%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	40 Orang	Orang	100,00%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen	Dokumen	100,00%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	Orang	100,00%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2 Laporan	Laporan	100,00%
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Dokumen	100,00%

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 yakni sebesar **Rp 4.041.603.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi	: Rp 4.026.403.005,-
- Belanja Modal	: Rp 15.200.000,-
T o t a l	: Rp. 4.041.603.005,-

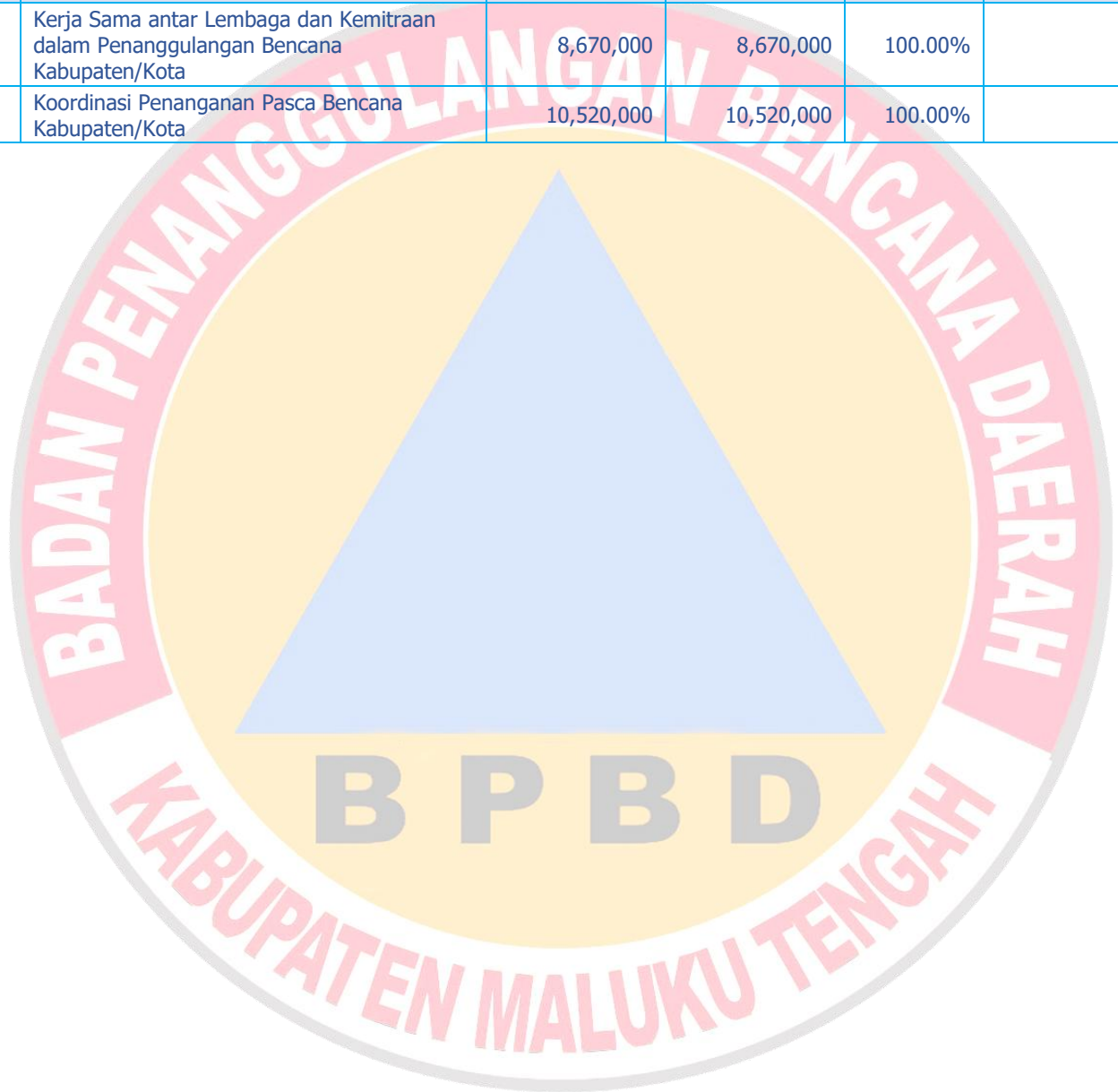
Dari anggaran tersebut telah direalisasi sebesar **Rp 3.938.014.334,-** atau **97,44%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	SISA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,821,591,005	3,723,856,334	97.44%	97,734,671
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,146,000	24,146,000	100.00%	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,611,000	1,611,000	100.00%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,085,000	18,085,000	100.00%	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	485,000	485,000	100.00%	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,965,000	3,965,000	100.00%	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,788,448,005	2,767,523,334	99.25%	20,924,671
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,768,603,005	2,747,678,334	99.24%	20,924,671
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	685,000	685,000	100.00%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	573,000	573,000	100.00%	-

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	SISA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,587,000	18,587,000	100.00%	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	565,000	565,000	100.00%	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	565,000	565,000	100.00%	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0.00%	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537,332,000	537,293,700	99.99%	38,300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,500,000	4,500,000	100.00%	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,197,000	4,197,000	100.00%	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,890,000	43,890,000	100.00%	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,800,000	12,800,000	100.00%	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000	7,500,000	100.00%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464,445,000	464,406,700	99.99%	38,300
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,200,000	15,200,000	100.00%	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,200,000	15,200,000	100.00%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252,900,000	190,128,300	75.18%	62,771,700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,100,000	72,328,300	63.95%	40,771,700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139,800,000	117,800,000	84.26%	22,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203,000,000	189,000,000	93.10%	14,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49,000,000	49,000,000	100.00%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,000,000	110,000,000	88.71%	14,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	30,000,000	100.00%	-
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	220,012,000	214,158,000	97.34%	5,854,000
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	46,022,000	41,162,000	89.44%	4,860,000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	46,022,000	41,162,000	89.44%	4,860,000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	93,480,000	92,730,000	99.20%	750,000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	10,752,000	10,752,000	100.00%	-
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	53,826,000	53,826,000	100.00%	-
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6,600,000	6,600,000	100.00%	-
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22,302,000	21,552,000	96.64%	750,000

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		TARGET	REALISASI	%	SISA
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	61,320,000	61,076,000	99.60%	244,000
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	45,680,000	45,536,000	99.68%	144,000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15,640,000	15,540,000	99.36%	100,000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	19,190,000	19,190,000	100.00%	-
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	8,670,000	8,670,000	100.00%	-
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	10,520,000	10,520,000	100.00%	-



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada Bab-Bab sebelumnya, terkait dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah dilaksanakan secara optimal berdasarkan sasaran strategis yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Sesuai sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Maluku Tengah.

4.2 Saran/Rekomendasi

Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan untuk tahun mendatang dapat dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat meningkatkan kinerja bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah di masa yang akan datang.

Masohi, Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maluku Tengah



Drs. NICOLAS N. ANAKOTTA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661106 198803 1 010